PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM KAITANNYA DENGAN EKONOMI ISLAM DAN
KERAKYATAN SERTA INVESTASI DI INDONESIA

Muannif Ridwan

Islamic University Of Indragiri

Email: anifr@ymail.com

Phone: +6281261412680

Abstrak

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh sebab itu, perlu adanya penafsiran supaya implementasinya dapat berjalan dengan sempurna. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar peraturan mengenai perekonomian dan Investasi di Indonesia, sehingga Pasal tersebut sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Artikel ini membahas mengenai penafsiran Pasal tersebut dalam kaitannya dengan ekonomi Islam dan kerakyatan serta investasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*), sehingga dapat diketahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Pada prinsipnya ekonomi dalam Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Adapun nilai-nilai sistem perekonomian Islam adalah keadilan sosial, ekonomi, distribusi pendapatan dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi jelas sekali bahwa pasal 33 UUD 1945 sangat sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dimana dalam Islam keselarasan dan keadilan sosial sangat dijunjung tinggi. Adapun ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sedangkan investasi di Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk; “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada keadilan dan perdamaian abadi*”.

Kata Kunci: Pasal 33 UUD 1945, ekonomi Islam, ekonomi kerakyatan, investasi.

Abstract

Every statutory regulation is abstract and passive. Abstract because it is general in nature, and passive because it does not cause legal consequences. Abstract regulations require stimulation in order to be active. Therefore, there needs to be an interpretation so that its implementation can run perfectly. Article 33 of the 1945 Constitution is the basis for regulations regarding the economy and investment in Indonesia, so that Article is very important for the formation of the regulations that are under it. This article discusses interpretation of the Article in relation to Islamic and populist economy and investment in Indonesia. This research uses analytical approach, so that it can be seen the meaning contained by the terms used in the legislation conceptually, as well as knowing its

application in practice and legal decisions. In principle, economics in Islam is a science that studies all human behavior in fulfilling their daily needs with the aim of obtaining falah (peace & prosperity in the world-hereafter). The values of the Islamic economic system are social justice, economy, income distribution and individual freedom in the context of social welfare. So it is clear that article 33 of the 1945 Constitution is very much in accordance with the concept of Islamic economics, where in Islam harmony and social justice are highly respected. As for a people's economy is an economic system that is aimed at realizing people's sovereignty in the economic field. While investment in Indonesia is appropriate the preamble to the fourth paragraph of the 1945 Constitution has stated that the objectives of the formation of the Indonesian state are to; "Protect the entire Indonesian nation and all spilled Indonesian blood; promote the general welfare; enrich the life of a nation; and participate in implementing world order based on justice and eternal peace ”.

Keywords: Article 33 of the 1945 Constitution, Islamic economy, people's economy, investment.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang ekonomi Indonesia, tidak lepas dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, karena Pancasila sebagai sumber dari segala hukum bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu ekonomi bangsa Indonesia disebut sebagai Ekonomi Pancasila, karena ekonomi Indonesia merujuk pada Pancasila sebagai dasar dalam membuat kebijakan pemerintah termasuk kebijakan Ekonomi.

Selain Pancasila, yang menjadi dasar bagi bangsa Indonesia adalah UUD 1945. Karena pada dasarnya UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila itu sendiri. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, bangsa Indonesia berpagang pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1-5. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 disamping mengatur tata kenegaraan juga mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hal ini yang membedakan konstitusi Republik Indonesia dengan tradisi penulisan konstitusi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya memuat materi-materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi yang dianut Indonesia, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis seperti negara-negara di Eropa Timur.¹

¹Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 124

Adanya perbedaan dalam susunan materi konstitusi yang digunakan oleh negara-negara di dunia menjadikan bentuk konstitusi dapat dibedakan dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut konstitusi politik (*political constitution*) seperti dalam konstitusi negara Perancis, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Belgia, Austria, Swiss, Siprus, Yunani, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luxemburg, Monaco, dan Liechtenstein. Sedangkan kelompok kedua terlihat dalam konstitusi negara Rusia, Bulgaria, Ceko, Slowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah, Hongaria, dan Indonesia yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*).²

Corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu; (4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penambahan dua ayat dalam pasal ini merupakan upaya untuk mengkomodasi ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dihapus, yaitu mengenai demokrasi ekonomi. Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.³

² *Ibid*, hlm 135

³ Arimbi HP dan Emmy Hafild, makalah *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan *Fiend of the eart* (FoE), Indonesia, 1999, hlm. 1

Jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang (seperti sumber daya alam) untuk kepentingan publik (*public interest*) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

Tetapi, permasalahan yang sering kali muncul menyangkut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu mendapat perhatian, ialah tentang aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada. Hak negara dalam menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh dalam beberapa undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya.

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.⁴ Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap ketentuan perundang-undangan perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Hal ini pernah disebutkan oleh Achmad Ali:⁵

“Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut”

Apa yang dikatakan oleh Achmad Ali senada dengan yang disebutkan oleh A. Pitlo, bahwa *“kata-kata apapun tak pernah jelas. Ia selalu membutuhkan penafsiran.”* Hal ini membantah pandangan lama yang menyebutkan *In claris non est interpretation* (aturan-aturan yang jelas tidak membutuhkan penafsiran). Adanya pandangan *In claris non est*

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Tentang Penemuan Hukum*, Yogya: Citraa Aditya Bakti, 1993, hlm 12

⁵ Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum, Syiar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, VOL. XIII. NO. 1, Maret 2012-Agustus 2012, hlm. 6

interpretation atau aturan-aturan yang jelas tidak membutuhkan penafsiran itu lahir dari sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) yang mengutamakan keberadaan undang-undang sebagai fondasi utama dalam ber hukum. Dalam doktrin *Trias Politica* Montesquieu, kekuasaan negara itu dipisah menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang yang berasal dari kedaulatan rakyat; eksekutif yang menjalankan undang-undang; dan yudikatif sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bernegara dengan mengkonkritkan hukum tertulis. Hakim hanya berperan sebagai cerobong undang-undang.⁶

Namun demikian, dalam perkembangan sejarah, pandangan yang memposisikan hakim sebagai cerobong undang-undang telah jauh bergeser. Pergeseran ini terjadi karena hakim dipandang sebagai agen perubahan hukum yang penting. Kemudian lahirlah istilah kebebasan dan kemandirian hakim. Bahkan hakim tidak boleh menolak perkara karena pengadilan atau mahkamah merupakan *the last resort* atau benteng terakhir dari pencari keadilan, karena hakim dianggap tahu dengan hukumnya. Hal ini sebagai bukti bahwa kodifikasi hukum tidak pernah sempurna.⁷

Disamping itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, undang-undang dasar dapat diubah melalui: (i) *formal amendement*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*.⁸

Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, bila kita akan melakukan penafsiran hukum (tertulis) maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (*intensi*) dari penyusunnya.⁹

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta; kencana, , 2004, hlm 27

⁷ Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 8

⁸ K.C Wheare, *Modern Constitution*, oxford University Press,1966

⁹ R.M Ananda B. Kusuma, “*Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*”, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 3, Jakarta, 2005, hlm 157.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat pada masa Ronald Reagan, Edwin Meese III, bahwa “satu-satunya cara pengadilan untuk menafsirkan konstitusi agar *legitimate* adalah mengikuti *intensi* (niat) yang asli dari penyusun dan meratifikasinya.”¹⁰

Jadi tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila peraturan perundang-undangannya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Atas dasar itulah, menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim.¹¹

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis menetapkan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu bagaimana penafsiran pasal 33 UUD 1945 dalam kaitannya dengan ekonomi Islam dan kerakyatan serta investasi di Indonesia?

C. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif, yang mengkaji berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*), sehingga dapat diketahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. *Kedua*, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹³

Pada dasarnya, pendekatan ini adalah untuk menganalisis pengertian hukum, asas

¹⁰ *Ibid*, hlm 157-158

¹¹ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959, hlm. 250

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.38-39.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, tt, hlm. 310.

hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya, konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik, dan sebagainya.¹⁴ Pendekatan analisis ini dinilai sangat penting lantaran kandungan hukum merupakan sebetuk organisme yang hidup dan bergerak secara dinamis guna menyikapi aneka perkembangan persoalan hukum yang sangat kompleks dewasa ini. Nashr Hamid Abu Zaid, pemikir Islam asal Mesir, dengan mengutip kata-kata Sayyidina Ali RA., pernah menandakan bahwa al-Qur'an adalah teks yang diam dan hanya manusialah yang mampu membuatnya hidup dan berbicara.¹⁵ Karena itu, pendekatan analisis terhadap teks mempunyai relevansinya tersendiri untuk melahirkan diktum-diktum hukum yang dinamis.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Penafsiran Hukum

Kata “penafsiran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai: pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsir. Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi.¹⁶ Bila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Penafsiran/ Interpretasi Hukum atau UU adalah uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tujuan dari Penafsiran Hukum adalah untuk menyatukan suasana kebatinan dan lahiriah sebanyak-banyak orang terhadap materi muatan pada peraturan perundang-undangan.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹⁸

Sedangkan Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna

¹⁴ *Ibid*, hlm. 311.

¹⁵ Nashr Hamid Abu Zaid, *Naqd al-Khitab al-Dini*, dalam edisi Indonesia, *Kritik Wacana Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 91.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, 1990, hlm. 336

¹⁷ Materi dari mata kuliah *Pengantar Ilmu Hukum* yang diajarkan oleh Dosen Lasro Marbun, SH.,MH.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Liberty*, Yogyakarta, 1995, hlm 154

yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.¹⁹

B. Pasal 33 UUD 1945 Dalam Kaitannya Dengan Ekonomi Islam

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Kata *Islam* setelah Ekonomi dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi *worldview* yang digunakan sebagai landasan nilai. Pada tingkat tertentu isu definisi Ekonomi Islam sangat terkait sekali dengan wacana Islamisasi Ilmu Pengetahuan (*Islamization of Knowledge*). *Science* dalam Islam lebih dimaknakan sebagai segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah SWT. (*revelation standard-kebenaran absolut*). Sedangkan *Science* dikenal luas dalam dunia konvensional adalah segala ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah (*human creation-kebenaran relatif*). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dan dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai *Ilahiyah*.²⁰

C. Dasar hukum Perekonomian di Indonesia

UUD 1945 telah mengatur mengenai dasar-dasar aturan perekonomian nasional yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan; “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*” dalam pasal ini jelas bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak serta merta melibatkan beberapa golongan saja tetapi kebangkitan ekonomi itu harus dapat melibatkan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat. Kebangkitan ekonomi itu juga harus memberikan dampak positif terhadap koperasi sebagai usaha bersama masyarakat, bukan malah menghancurkannya karena bermunculan investasi-investasi asing ke Indonesia. Kemudian ada pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan; “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai*

¹⁹Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum, Syiar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, VOL. XIII. NO. 1, Maret 2012-Agustus 2012, hlm. 6

²⁰Zainal Anwar, S.Pd, *Sistem Perekonomian Indonesia Dalam Pandangan Islam*, 15 Desember 2014, hlm. 2

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Kaitannya pada pasal ini bahwa pemerintah harus dapat menjaga cabang-cabang produksi milik Negara yang penting, untuk tetap dikuasai oleh Negara.²¹

Kepemilikan asing pada cabang-cabang produksi Negara tidak boleh melebihi kepemilikan Negara. Negara harus tetap menjadi penguasa dalam mengatur dan membuat keputusan terkait sebagai penguasa terhadap cabang-cabang produksi tersebut. Selanjutnya pada pasal 33 ayat (3) UUD 45 menyebutkan; “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: “*al-muslimuna syuraka’u fi tsalatsin, al-ma’u wa al-kala’u wa an-naru*” (Kaum muslimin itu bersyariat dalam tiga perkara, yaitu air, rumput liar, dan energi api). (HR. Ahmad)²²

Pangkal hadits ini mengandung arti perintah untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim menggunakan air (*al-ma’*), rumput liar (*al-kala’*) dan energi api (*an-nar*) atau dalam hal ini termasuk panas bumi, gas, bahan bakar, tenaga surya, api menyala, dan pengaturan cahaya, itu semua sebagai milik bersama tidak boleh seorang pun memonopoli kepemilikannya. Karena sebagai milik bersama, maka tidak ada hak individu menguasainya untuk kepentingan pribadi.

Jika ada orang lain membutuhkannya, maka tidak boleh mencegahnya. Dalam riwayat Abu Hurairah berbunyi; “*tiga perkara tidak boleh dimonopoli hingga malarang yang lain untuk memanfaatkannya yaitu air, rumput liar dan api.*”²³ Dengan demikian setiap individu mesti meyakini bahwa di samping dirinya memiliki hak untuk memanfaatkannya juga terdapat di dalamnya hak orang lain. Karena ada hak orang lain, maka siapa pun mesti memberikan kesempatan pada pihak lainnya untuk ikut menikmati dan memanfaatkannya. Tegasnya berserikat di sini dalam arti mengambil manfaat.

Terdapat kesamaan pada ayat sebelumnya bahwa Negara juga harus menguasai, namun disini obyeknya adalah kekayaan alam dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kebangkitan ekonomi setidak-tidaknya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kekayaan-kekayaan alam Indonesia berada dibawah penguasaan Negara tanpa terkecuali. Pada pasal 33 ayat (4) UUD 45 menyebutkan; “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan*

²¹ *Ibid*, hlm. 4

²² *Musnad Ahmad*, Juz 47 hlm.57 no. 2204

²³ *Sunan Ibn Majah*, no.2464

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.²⁴

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi disini adalah terkandung gagasan bahwa kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, dimana sumber-sumber produksi pada pokoknya juga berada ditangan rakyat yang berdaulat. Jadi, rakyat sepenuhnya berhak atas sumber-sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran mereka sendiri. Potensi kebangkitan ekonomi sudah sepantasnya juga memperhatikan bahwa perekonomian nasional itu pada dasarnya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip yang tidak boleh disimpangi, dan pemerintah juga harus mengawasi dari penyimpangan-penyimpangan prinsip yang disebutkan pada Pasal 33 ayat (4) tersebut. Dimana perekonomian itu harus memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁵

Dalam menghadapi potensi akan kebangkitan ekonomi nasional, sudah sepantasnya pemerintah tetap memperhatikan dasar-dasar hukum perekonomian nasional Indonesia yang sudah diatur jelas dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 33 diatas. Pemerintah tidak dapat begitu saja melepas perekonomian nasional kepada pasar. Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) maka pemerintah haruslah menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan roda perekonomian nasional Indonesia.

D. Sistem Perekonomian di Indonesia

Indonesia tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi komando, Sistem ekonomi pasar, maupun Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah *Sistem Ekonomi Pancasila*, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, maka dikenal juga dengan *Sistem Demokrasi Ekonomi*. Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat

²⁴ Zainal Anwar, S.Pd, makalah *Sistem Perekonomian Indonesia Dalam Pandangan Islam*, 15 Desember 2014, hlm. 4

²⁵ *Ibid*, hlm. 5

berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Sistem Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri yang positif bagi Indonesia, diantaranya adalah :²⁷

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
4. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
5. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
6. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
7. Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja.

Adapun status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

1. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran: ayat 14: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*
2. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Sebagaimana firman Allah surat Al-Anfaal ayat 28: *Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

²⁶ *Ibid*, hlm.5

²⁷ *Ibid*, hlm 2-3

3. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah. Tercantum dalam QS. At-Taubah: 41, QS. At-Taubah: 60, dan QS. Ali Imran: 133-134. *“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.. (QS. At-Taubah : 41) *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. At-Taubah: 60) *“Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.”* (QS. Ali Imran: 133-134)

Dengan demikian perkonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya *Free fight liberalism*, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas, sebagaimana tercantum dalam surat *al An’am*: 165 dan *adz dzaariyaat*: 56:

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS Al-An’aam: 165)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”(QS. adz-Dzaariyaat: 56).

Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayat* “ sistem kehidupan “ dan *wasilah al-hayat* “ sarana kehidupan .

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaliknya

meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer.

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hayatan thayyibah*. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, *ma'isyatan dhanka* atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti, (QS. Thaha: 124-126).

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” Dia berkat, *“Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?”*. Dia (Allah) berfirman, *“Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan.”*

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *wasilah al-hayah* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasilah al-hayah* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari keterangan diatas, Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 284:

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

- b. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Pencipta awal segala energi adalah Allah SWT. Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggan diri. Hal itu sebagaimana disinggung dalam QS. Al-‘Alaq ayat 6-7:

“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena Dia melihat dirinya serba cukup.”

- c. Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui bekerja (*a'mal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. *An-Naba'* ayat 11: *“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”* dan dan QS. *Al-A'raf* ayat 10: *“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”*

E. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian Islam

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya surat *Al-Baqarah* ayat 60 dan *Al-Ma'idah* ayat 87-88.

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing) Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Al-Baqarah ayat 60)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Ma'idah ayat 87-88)

Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu

yang telah ditetapkan. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perkonomian dalam Islam adalah:²⁸

1) Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada manusia.

2) Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploiasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

3) Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini;

Pertama Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat. Melaksanakan *amanah at-takaaful al-ijtima'I social economic security insurance* dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu. Dengan cara itu, standar

²⁸ *Ibid*, hlm. 9-11

kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabatnya yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Kedua Islam membenarkan seorang memilih kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer. Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi di dalam masyarakat.

4) Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah hal itu termaktub dalam QS. *Ar-Ra'd*: 36 dan QS. *Luqman*: 32.

Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".(QS. Ar-Ra'd: 36)

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.(QS. Luqman: 32.)

Ini merupakan dasar bagi Piagam Kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini Al Qur'an tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya. Sebagaimana termaktub dalam QS. *Al-A'raf* ayat 157.

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Konsep Islam sangat jelas, bahwa manusia dilahirkan merdeka. Karenanya tidak ada seorang pun bahkan Negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan Allah. Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasal 33 UUD 1945 itu sangat sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dimana dalam Islam keselarasan dan keadilan sosial sangat dijunjung tinggi.

F. Pasal 33 UUD 1945 Kaitannya dengan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Atau dalam pengertian lain yaitu suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.²⁹

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran Seseorang saja. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Dalam Pasal 33 ini menjelaskan

²⁹ Makalah ditulis oleh: Endang Mulyani, *Ekonomi Kerakyatan*, Kalasan Sleman Yogyakarta, Pendidikan Ekonomi FISE UNY.

bahwa perekonomian indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan.³⁰

Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹

Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tindak-tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (*accountable*), dan transparan (*good governance*).³²

Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan diantaranya sebagai berikut:³³

- 1) Yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat adalah negara atau pemerintah negara tersebut. Misalnya seperti: bahan bakar minyak, air dan sumber daya alam yang lainnya.
- 2) Peran negara di ekonomi ini sangatlah penting akan tetapi tidak dominan, dan begitu juga peran dari pihak swasta yang posisinya memang penting akan tetapi tidak mendominasi juga. Sehingga tidak mungkin terjadi kondisi sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak tersebut yaitu pemerintah dan juga pihak swasta hidup berdampingan secara damai dan saling men-support satu sama lain.
- 3) Di dalam perekonomian ini masyarakat adalah bagian yang sangat penting, karena kegiatan produksi yang dilakukan, diawasi dan dipimpin oleh anggota masyarakat.
- 4) Buruh maupun modal tidak mendominasi perekonomian sebab ekonomi ini didasari atas asas kekeluargaan.

³⁰ *Bunyi Pasal 33 UUD 1945 (1-5) Dan Pembahasannya*, 27 Maret 2014 diakses melalui website pada pukul 15:59 WIB, Jumat 17 Nov 2016: <http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html>

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Artikel; *Mengenal Pengertian Ekonomi Kerakyatan Secara Lengkap*, ditulis oleh: Sora N. diakses melalui website pada pukul 16:13 WIB, 17 Nov 2016: <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-ekonomi-kerakyatan.html>

Adapun tujuan dari ekonomi kerakyatan, diantaranya:³⁴

- 1) Untuk membangun negara yang berdikari secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta memiliki berkepribadian yang berkebudayaan.
- 2) Untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.
- 3) Dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan.
- 4) Dan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.
- 5) Dan berikut ini kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kerakyatan

Sementara sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri mempunyai kelebihan diantaranya:³⁵

- 1) Rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian.
- 2) Dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata.
- 3) Sistem ekonomi ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.
- 4) Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan.
- 5) Transaksi antara produksi, distribusi dan konsumsi sangat baik.
- 6) Hubungan antara produksi, distribusi dan juga konsumsi akan saling membutuhkan dan sangat baik.

Dimana ada kelebihan pasti ada juga kelemahan atau kekurangannya, berikut ini kelemahan dari sistem ekonomi kerakyatan:³⁶

1. Aksi membagi-bagi uang ini secara tidak sadar dapat menyebabkan usaha mikro atau kecil dan menengah serta koperasi yang selama ini tidak berdaya dapat bersaing dalam suatu mekanisme pasar, bias menjadi sangat bergantung pada aksi tersebut.
2. Masih kurangnya pengetahuan rakyat mengenai Investasi, akibatnya dapat menyebabkan kemiskinan terlalu lama atau perputaran roda yang lambat.
3. Kurangnya penerapan dari manajemen.
4. Harus di awasi, jika tidak diawasi dengan baik akan banyak koruptor.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

G. PASAL 33 UUD 1945 dalam Kaitannya dengan Investasi

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk; *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*³⁷

Untuk mengupayakan masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam UUD 1945, maka salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengundang masuk modal asing ke Indonesia. Dalam mengupayakan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang memenuhi rasa keadilan sosial, harusnya bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia termasuk pemerintah harus mengindahkan ketentuan-ketentuan Pasal 33 UUD 1945.³⁸

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa keadilan sosial tidak semata-mata diartikan sebagai masyarakat yang cukup sandang, pangan, dan papan; tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk turut memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan turut secara bersama mewujudkan masa depan itu.³⁹

Terkait penjelasan Pasal 33 UUD 1945 ini Prof. DR. Mr. Soepomo sebagai arsitek UUD 1945 menulis dalam salah satu bukunya memberi pengertian "dikuasai" sebagai berikut: "... termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi..."⁴⁰

Sementara itu terkait frasa “dikuasai oleh negara” Mahkamah Konstitusi mengartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam artian luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.⁴¹ Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengartikan Rakyat secara kolektif itu

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4

³⁸ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1). Perekonomiandisusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.; 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.; 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

³⁹ Todung Mulya Lubis (1992). *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 27

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 002/PUU-I/2003, hal. 35

⁴¹ *Ibid.*, hal. 208.

dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Merujuk kepada tafsiran Mahkamah Konstitusi di atas, bisa dikatakan tidak ada larangan bagi pemodal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia khususnya dalam mengelola sektor-sektor penting tersebut. Akan tetapi ada batasan mengenai komposisi saham pemodal dari sektor swasta untuk menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut. Penggunaan modal asing ini pada dasarnya perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Akan tetapi, harapan untuk mendapatkan keuntungan besar dari pemodal asing justru yang terjadi saat ini, banyak perusahaan-perusahaan asing terlalu mendominasi bahkan di dalam kenyataannya perusahaan penanaman modal asing yang masuk di Indonesia kebanyakan sudah berbentuk Perusahaan Multi Nasional (PMN) atau Multi Nasional Corporation (MNC).⁴²

Mengenai kepemilikan saham dan struktur permodalan sendiri, Sumantoro menyatakan dikenal adanya berbagai ketentuan yang menetapkan kepemilikan saham asing minoritas, kepemilikan saham asing mayoritas, kepemilikan saham asing 50/50, kepemilikan saham asing 49/51, dan kepemilikan saham asing 100%.⁴³ Di dalam program Indonesiasi, pemerintah telah menetapkan alternatif 49/51. Dalam konteks ini belum dipertimbangkan aspek-aspek jenis saham, pembagian jenis saham, pembagian laba dan penilaian atas aset serta hak menentukan pengelolaan perusahaan.⁴⁴

Sementara jika dilihat kebelakang ekonomi Indonesia pasca transisi politik tahun 1967 bergerak menuju ekonomi liberal. Hal tersebut dipertegas dengan beberapa paket kebijakan ekonomi, seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan beberapa kebijakan lainnya setelah itu. Disamping itu pada tahun

⁴² Syahrul Fitra, Antonius Kanaris dan Triani, *Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Ditinjau Dari Pasal 33 UUD Tahun 1945 dan Implikasinya Terhadap Iklim Investasi di Indonesia*, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, program studi Hukum Ekonomi, 2013, hlm. 5

⁴³ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Bandung: Bina Cipta, 1985, Hal. 95-100.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 6

1968 pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan fasilitas tambahan masa pembebasan pajak untuk perusahaan asing yang berbentuk patungan. Mulai saat itu penanam modal asing di Indonesia dapat berbentuk penanaman modal langsung yang dimiliki asing atau berbentuk usaha patungan. Pada tahun 1974 sidang kabinet menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya menarik investor dengan memberikan kemudahan memperkenalkan pengelolaan perusahaan oleh personil asing, menjamin transfer modal dan keuntungan sesuai dengan mata uang yang dikehendaki, dan jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi.⁴⁵ Sejak tahun 1974, pemerintah menerbitkan kebijakan baru yang mensyaratkan semua penanaman modal asing berbentuk usaha patungan yang selanjutnya persyaratan tersebut lebih ditegaskan lagi yaitu bahwa pemilikan saham nasional menjadi mayoritas dalam waktu sepuluh tahun. Namun ada pengecualian untuk sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dari ketentuan mayoritas kepemilikan saham tersebut. Akan tetapi kebijakan tahun 1974 tersebut belum ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:⁴⁶

1. Dilihat dari segi kemampuan permodalan peserta nasional
2. Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam peningkatan kepemilikan saham nasional belum bekerja seperti diharapkan.
3. Kebijakan tersebut belum dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan sehingga dalam penerapannya menimbulkan berbagai penafsiran.

Kenyataan menunjukkan bahwa sampai tahun 1980 tidak ada perusahaan modal asing yang mengikuti kebijakan tersebut dengan menawarkan sahamnya lebih dari 51% kepada pihak Indonesia. Bahkan Sumantoro mensinyalir bahwa di Indonesia telah timbul aneka ragam aturan yang mengatur sektor perekonomian yang acapkali ganti berganti dan adakalanya saling bertentangan atau tidak mendukung satu sama lain di antara berbagai subsektor, yang diakibatkan karena tidak mutakhirnya hukum dasar yang mengatur sektor ekonomi.⁴⁷ Kebijakan liberalisasi ekonomi tersebut memuncak dikisaran tahun 1988 hingga tahun 1998, yang mengakibatkan kebablasan kebijakan ekonomi yang berisiko terhadap kondisi ekonomi Indonesia, beberapa di antaranya Bank Indonesia kehilangan

⁴⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 46.

⁴⁶ Anang Priyanto, Eni Kusdarini, Candra Dewi Puspitasari, *Kebijakan Pengaturan Divestasi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006, hal. 12-13.

⁴⁷ Sumantoro, *Op. Cit.*, hal. 201-215

kendali atas sistem moneter di Indonesia, pihak swasta dan modalnya menggantikan peran negara sebagai pengatur ekonomi mikro, beban utang negara besar sehingga kejutan-kejutan sekecil apapun ataupun pelarian modal dapat berakibat fatal, dan terakhir liberalisasi yang dilakukan setengah-setengah hanya menguntungkan segelintir orang yang mengontrol modal.⁴⁸

Paket kebijakan liberalisasi ekonomi tersebut, bisa dikatakan tidak merefleksikan semangat dari Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan setiap pengelolaan sektor usaha strategis dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Justru dengan kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir orang yang mengontrol modal. Jika belajar ke negara tetangga seperti Malaysia pengelolaan pertambangan seperti minyak bumi tidak ada dikelola oleh swasta, yang swasta adalah di Amerika Serikat, tetapi tidak berarti itu benar, swasta di Amerika Serikat justru mereka melakukan konservasi, tidak menyentuh sumber minyaknya, tidak mengebor banyak-banyak, dia menggunakan yang dari luar.⁴⁹

Pasca reformasi, liberalisasi ekonomi kembali menampakkan diri. Hal itu tercermin dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang baru. Undang-Undang ini lebih buruk dari Undang-Undang sebelumnya dalam hal melindungi masyarakat lokal atau komunitas, bahkan parahnya lagi dalam UUPM ini mengatur sendiri mengenai masa pemberian hak guna usaha (HGU) bagi perusahaan selama 95 tahun dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut pemerintah dinilai memberi *privilege* kepada investor asing dan sudah jelas Pasal 22 tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Disamping itu Pasal 22 tersebut juga bertentangan dengan semangat UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 22 UUPM tersebut, merupakan bencana legislasi di Indonesia, yang pada akhirnya dihapuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI. Menurut keterangan ahli dari Universitas Gajah Mada, Revrisond Baswir dalam sidang

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 47

⁴⁹ Keterangan ahli Prof. Dr. Sri Edie Swasono, S.E. pada perkara di Mahkamah Konstitusi RI No.002/PUU-I/2003, hal. 84-85

⁵⁰ Pasal 22 *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4724) sebelum *Judicial Review*.

judicial review perkara No. 21-22/PUU-V/2007 tentang UUPM tersebut menarik kesimpulan paradigma warisan kolonial masih membayang-bayangi para pengambil kebijakan hingga kini. Menurutnya, kebijakan ekonomi dalam UUPM tidak sejalan dengan landasan ideologis dan latar belakang historis pembentukan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi bagian dari konsiderans UUPM justru bersemangat anti kolonialisme, untuk bangkit sendiri secara ekonomi. Menurutnya, ketentuan mengenai “*dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” dalam ketentuan itu berarti negara wajib membuat regulasi yang memihak kepada kemakmuran rakyat dan melindungi kepentingan pemodal dalam negeri.⁵¹

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam terutama sektor pertambangan seringkali sarat dengan intervensi asing, dan tampaknya pemerintah gagal mengintegrasikan fakta ekonomi itu ke dalam prinsip keadilan, kepatutan dan kemandirian yang dapat berdampak pada kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak rakyatnya untuk mendapatkan kemakmuran. Berkaitan dengan masalah pertambangan, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang lama (Tahun 1967) menyatakan bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah Indonesia atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Perlu diketahui bahwa pengelolaan bidang pertambangan seharusnya melibatkan masyarakat setempat. Di samping itu, sudah semestinya pengaturan penanaman modal asing bidang pertambangan diatur berbeda dan agak ketat dengan pengaturan bidang-bidang usaha lain mengingat sifat-sifat khusus dari usaha pertambangan itu sendiri. Sifat-sifat khusus usaha pertambangan sebagaimana dikemukakan oleh G. Kartasapoetra dkk. yakni:⁵³

⁵¹ Revisond Baswir, *Kontrak Karya Pertambangan*, Tersedia di: <http://muhammadbarli.blogspot.com/2009/06/kontrak-karya-pertambangan.html>, 24 September 2013, 20. 45 WIB.

⁵² *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818)*, Pasal 8.

⁵³ G. Kartasaputra, dkk. *Manajemen Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal.278-279.

1. Usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang menggali, memanfaatkan dan mengurangi serta mengahbiskan sesuatu kekayaan nasional berupa bahangalian yang tidak dapat ditumbuhkan kembali;
2. Usaha pertambangan pada umumnya memerlukan *skill* khusus dan permodalan yang tidak sedikit, sedangkan resikonya sangat besar;
3. Usaha-usaha pertambangan pada umumnya di samping mempunyai aspek-aspek nasional seringkali pula menyangkut aspek-aspek internasional, misalnya perusahaan-perusahaan bahan galian strategis maupun vital seperti minyak bumi, mineral radioaktif, nikel dan lain sebagainya;
4. Eksploitasi bahan galian secara besar-besaran hanya dapat dibenarkan apabila secara nasional telah dapat pula digariskan *Policy* pencadangan bahan galian yang sehat dan seimbang.

Selanjutnya G. Kartasapoetra dkk. melihat berdasarkan sifat-sifat khusus tersebut, maka pengikutsertaan modal asing di bidang usaha pertambangan di Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang khusus pula. Hal ini tidak lain dengan maksud dan tujuan pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari kekayaan mineral kita, termasuk di dalamnya segi-segi pengamanan kepentingan-kepentingan nasional dalam arti luas.⁵⁴

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Adapun nilai-nilai sistem perekonomian Islam adalah keadilan sosial, ekonomi, distribusi pendapatan dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi intinya jelas sekali bahwa pasal 33 UUD 1945 itu sangat sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dimana dalam Islam keselarasan dan keadilan sosial sangat dijunjung tinggi.
2. Ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Atau suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat

⁵⁴ Ibid.

dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.

3. Terkait dengan investasi di Indonesia, pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk; *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada keadilan dan perdamaian abadi”*. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, salah satu upaya yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengundang masuk modal asing ke Indonesia dalam mengupayakan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang memenuhi rasa keadilan sosial dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
4. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme), Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat). Dari butir-butir tersebut, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia yang dijelaskan dalam UUD 45 yaitu pasal 33 ayat 1-5.
5. Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 itu berlandaskan semangat sosial yang menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tindak-tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (*accountable*), dan transparan (*good governance*).

B. Saran

Seharusnya dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perekonomian berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam suatu undang-undang juga harus sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau sesuai dengan niat pembuat undang-undang tersebut, sehingga undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan sempurna.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Cetakan 2009.

Anang Priyanto, Eni Kusdarini, Candra Dewi Puspitasari, *Kebijakan Pengaturan Divestasi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006

Anwar, Zainal, S.Pd, *Sistem Perekonomian Indonesia Dalam Pandangan Islam*, 15 Desember 2014

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, kencana, Jakarta, 2004

Arimbi HP dan Emmy Hafild, makalah :*Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of the eart (FoE), Indonesia, 1999

Asshiddiqie, Jimmly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, 1990

K.C Wheare , *Modern Constitution*, oxford University Press,1966

K. Harjono, Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Liberty*, Yogyakarta, 1995

Mulya Lubis, Todung, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Musnad Ahmad, Juz 47, tanpa tahun.

R.M Ananda B. Kusuma, “*Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*”, tanpa tahun.

Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Tentang Penemuan Hukum*, Citraa Adity Bakti, Yogyakarta, 1993

Sunan Ibn Majah, tanpa tahun.

Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Bandung: Bina Cipta, 1985

G. Kartasaputra, dkk. *Manajemen Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal.278-279.

Sumber Lain (Makalah, Artikel, Internet dan Peraturan Perundang-undangan)

Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum, Syiar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, VOL. XIII. NO. 1, Maret 2012-Agustus 2012

Bunyi Pasal 33 UUD 1945 (1-5) Dan Pembahasannya, 27 Maret 2014 diakses melalui website pada pukul 15:59 WIB, Jumat 17 Nov 2016: <http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html>

Endang Mulyani, *Ekonomi Kerakyatan*, Kalasan Sleman Yogyakarta, Pendidikan Ekonomi FISE UNY

Materi dari mata kuliah *Pengantar Ilmu Hukum* yang diajarkan oleh Dosen Lasro Marbun, SH.,MH.

Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 3, Jakarta, 2005

Keterangan ahli Prof. Dr. Sri Edie Swasono, S.E. pada perkara di Mahkamah Konstitusi RI No.002/PUU-I/2003

Mengenal Pengertian Ekonomi Kerakyatan Secara Lengkap, diakses melalui website pada pukul 16:13 WIB, 17 Nov 2016: <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-ekonomi-kerakyatan.html>

Pasal 22 *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4724) sebelum *Judicial Review*.

Pasal 33 UUD 1945 (1-5) Dan Pembahasannya, 27 Maret 2014 diakses melalui website pada pukul 15:59 WIB, Jumat 17 Nov 2016: <http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html>

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 002/PUU-I/2003

Revisi Baswir, *Kontrak Karya Pertambangan*, bias diakses melalui: <http://muhammadbarli.blogspot.com/2009/06/kontrak-karya-pertambangan.html>

Syahrul Fitra, Antonius Kanaris dan Triani, *Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Ditinjau Dari Pasal 33 UUD Tahun 1945 dan Implikasinya Terhadap Iklim Investasi di Indonesia*, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Program Studi Hukum Ekonomi, 2013. Bisa diakses melalui: <https://www.scribd.com/doc/249539834/Kontrak-Karya-PT-Freeport-Ditinjau-Dari-Pasal-33-UUD-1945>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818*), Pasal 8.

<http://www.berandahukum.com/p/penafsiran-interprestasi-uu.html>